



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I Nomor 12 Telp.(0265) 771312 Ciamis
Laman : dispusip.ciamiskab.go.id Pos 46211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 10 ayat (11), pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilakukan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 33 ayat 4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan dan Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pengumpulan Kinerja dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
14. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
19. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PERATURAN Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Ciamis;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
34. Keputusan Kepala lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan No 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
40. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
41. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pengumpulan Kinerja, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pengumpulan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Penyusunan Peta Kompetensi dan lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 2 April 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

